



Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Kritis dan Bertanggung Jawab di Era Digital: Studi Literatur

Rohana Lubis¹, Nur Hakima Akhirani Nasution², Rika Puspita Hasibuan³, Arini Tri Shintia Nasution⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAI Padang
Lawas, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Indonesia¹²³⁴

Email rohana1654@gmail.com¹, nurhakima1992@gmail.com²,
rikapuspitahasibuan@gmail.com³, arininasution35@gmail.com⁴,

Abstract *This article discusses Civic Education as a foundation for shaping students' critical and responsible character in the digital era. The rapid development of digital technology has influenced students' ways of learning, communicating, accessing information, and participating in social life. However, the digital era also brings various challenges, such as hoaxes, cyberbullying, hate speech, digital ethics issues, and the lack of critical thinking in receiving information. This study uses a qualitative approach with a literature review method by examining books, journal articles, legal documents, and relevant academic sources related to Civic Education, student character, critical thinking, responsibility, digital literacy, and digital citizenship. The results of the study show that Civic Education plays an important role in strengthening students' moral values, national awareness, legal awareness, democratic attitudes, tolerance, and social responsibility. Civic Education also contributes to developing students' critical thinking skills in filtering digital information and building responsible behavior as digital citizens. Therefore, Civic Education needs to be developed contextually and adaptively to respond to the challenges of the digital era.*

Keywords: Civic Education; Student Character; Critical Thinking; Responsibility; Digital Era

Abstrak Artikel ini membahas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab di era digital. Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi cara mahasiswa belajar, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, rendahnya etika digital, serta lemahnya kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan mengkaji buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber akademik yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karakter mahasiswa, berpikir kritis, tanggung jawab, literasi digital, dan kewarganegaraan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam memperkuat nilai moral, kesadaran kebangsaan, kesadaran hukum, sikap demokratis, toleransi, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan juga berkontribusi dalam membentuk kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menyaring informasi digital serta membangun perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan secara kontekstual dan adaptif agar mampu menjawab tantangan era digital.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Karakter Mahasiswa; Berpikir Kritis; Tanggung Jawab; Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda tidak dapat dipisahkan dari penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform digital dalam aktivitas sehari-hari. Ruang digital memberikan banyak kemudahan, seperti akses informasi yang cepat, komunikasi yang luas, serta peluang untuk belajar secara mandiri. Namun, di sisi lain, perkembangan digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, rendahnya etika

bermedia sosial, budaya komentar negatif, *cyberbullying*, serta kecenderungan menerima informasi tanpa proses berpikir kritis.

Tingginya penggunaan internet di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024), jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%. APJII juga mencatat bahwa pengguna internet didominasi oleh kelompok Generasi Z dan generasi milenial, yaitu kelompok usia yang banyak berada pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang sangat dekat dengan dunia digital sehingga perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah yang membahas negara, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap, nilai, moral, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan tinggi sendiri memiliki peran strategis dalam menghasilkan intelektual dan profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu diarahkan agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012).

Pendidikan Kewarganegaraan di era digital menjadi semakin relevan karena mahasiswa dituntut tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mampu bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang diterima. Sikap kritis diperlukan agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, provokasi, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Unesco (2022), menegaskan bahwa literasi media dan informasi penting untuk membantu masyarakat terlibat secara kritis dengan informasi, menavigasi ruang digital secara aman, serta menghadapi tantangan abad ke-21 seperti misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu karakter penting yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi era digital.

Selain sikap kritis, tanggung jawab juga menjadi karakter penting yang perlu dibentuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa sebagai warga negara digital harus mampu menggunakan kebebasan di ruang digital secara bijak, seperti tidak menyebarkan berita palsu, menghargai perbedaan pendapat, menjaga privasi, menggunakan bahasa yang santun, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kerangka literasi digital di Indonesia, terdapat empat pilar penting, yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Keempat pilar tersebut menekankan pentingnya kemampuan menggunakan teknologi secara positif, aman, produktif, dan bertanggung jawab (Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki hubungan erat dengan konsep kewarganegaraan digital. Saputra menjelaskan bahwa integrasi kewarganegaraan digital dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi upaya untuk menumbuhkan etika berinternet atau netiket di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh hanya dipahami sebagai pembelajaran teoritis, tetapi juga perlu dikembangkan sesuai dengan realitas kehidupan mahasiswa di era digital. Melalui pembelajaran yang relevan, mahasiswa dapat diarahkan untuk menjadi warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya dalam

kehidupan berbangsa, tetapi juga mampu menerapkannya dalam ruang digital (Saputra, 2022).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membangun pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta sikap atau kepribadian kewarganegaraan mahasiswa di era digital. Widiatmaka dkk. (2025) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di era digital berperan dalam membangun karakter bangsa pada mahasiswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya motivasi belajar mahasiswa, kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, serta adanya pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan karakter kebangsaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab di era digital menjadi penting untuk dilakukan. Mahasiswa membutuhkan bekal nilai, moral, dan kesadaran kewarganegaraan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa, khususnya karakter kritis dan bertanggung jawab, melalui pendekatan studi literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau *library research*. Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau penyebaran kuesioner, melainkan melalui pengumpulan, pembacaan, pengkajian, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur digunakan untuk memahami dan menjelaskan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab di era digital. Menurut Snyder (2019), kajian literatur dapat digunakan sebagai metodologi penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis pengetahuan yang telah berkembang dalam suatu bidang kajian. Sementara itu, Zed (2014) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama dalam memperoleh data penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, dokumen ilmiah, dan sumber akademik lain yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, pembentukan karakter mahasiswa, berpikir kritis, tanggung jawab, literasi digital, dan kewarganegaraan digital. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian, yaitu bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk mahasiswa agar memiliki karakter kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber, seperti buku metodologi penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen pendukung yang relevan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain Pendidikan Kewarganegaraan, karakter mahasiswa, berpikir kritis, tanggung jawab, era digital, literasi digital, dan *digital citizenship*. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi isi, kejelasan pembahasan, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Denney & Tewksbury (2013), menjelaskan bahwa literature review bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian sebelumnya terhadap suatu topik, sehingga dapat membantu penulis memahami perkembangan kajian yang sedang dibahas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur dibaca, dipahami, dikelompokkan, kemudian dianalisis sesuai dengan pokok pembahasan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pendapat ahli, teori, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Machi & McEvoy (2024), menjelaskan bahwa kajian literatur dapat dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari menentukan topik, mencari literatur, mengembangkan argumen, menilai sumber, hingga menyusun hasil kajian secara terstruktur.

Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi: pertama, menentukan fokus kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan karakter mahasiswa di era digital. Kedua, mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, menyeleksi sumber yang sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Keempat, mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema, seperti konsep Pendidikan Kewarganegaraan, karakter mahasiswa, sikap kritis, tanggung jawab, dan tantangan era digital. Kelima, menganalisis isi literatur untuk menemukan hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembentukan karakter mahasiswa. Keenam, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Pembentukan Karakter Mahasiswa

Berdasarkan hasil studi literatur, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan penting dalam pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang negara, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta hukum, tetapi juga menjadi sarana pembentukan sikap dan kepribadian mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 3, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai bagian penting dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran moral, sosial, dan kebangsaan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012).

Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti cinta tanah air, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, sikap demokratis, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan mahasiswa karena mahasiswa merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional sesuai bidang keilmuannya, tetapi juga diarahkan agar mampu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003).

Dalam konteks pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi ruang pembelajaran yang dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan

sosial mahasiswa. Artinya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi harus mampu membentuk sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya, menghargai perbedaan, memiliki kepedulian sosial, dan mampu mengambil keputusan secara bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Widiatmaka dkk. (2025), menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di era digital berperan dalam membangun pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta sikap atau kepribadian kewarganegaraan mahasiswa. Tujuan utamanya adalah membangun karakter bangsa karena Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah yang berperan langsung dalam pembentukan karakter mahasiswa.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa karena di dalamnya terdapat nilai moral, nilai hukum, nilai demokrasi, nilai kebangsaan, dan nilai tanggung jawab sosial. Dalam era digital, nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting karena mahasiswa tidak hanya hidup dalam ruang sosial secara langsung, tetapi juga aktif dalam ruang digital. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan agar mampu membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Karakter Mahasiswa di Era Digital

Era digital telah mengubah cara mahasiswa belajar, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Internet dan media sosial memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan, mengikuti perkembangan isu publik, serta menyampaikan pendapat secara cepat. Namun, kemudahan tersebut juga membawa berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi, plagiarisme, dan rendahnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Data APJII tahun 2024 menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%. Pengguna internet juga didominasi oleh Generasi Z dan milenial, yaitu kelompok usia yang banyak berkaitan dengan pelajar dan mahasiswa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang sangat dekat dengan dunia digital. Oleh karena itu, karakter mahasiswa di era digital tidak hanya diukur dari kecerdasan akademik, tetapi juga dari kemampuannya menggunakan teknologi secara bijak. Mahasiswa perlu memiliki karakter kritis agar mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki karakter bertanggung jawab agar dapat menggunakan media digital dengan etika, menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, serta menjaga keamanan data pribadi.

Karakter mahasiswa di era digital dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, mahasiswa harus memiliki integritas, yaitu kejujuran dalam menggunakan informasi dan teknologi. Integritas ini penting karena era digital memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain, menyebarkan informasi tanpa sumber yang jelas, atau menggunakan teknologi untuk kepentingan yang tidak etis. Kedua, mahasiswa harus memiliki sikap kritis, yaitu kemampuan untuk menilai informasi berdasarkan fakta, sumber, dan logika. Ketiga, mahasiswa harus memiliki tanggung jawab, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki dampak bagi diri sendiri dan orang lain.

Keempat, mahasiswa perlu memiliki sikap toleran dan demokratis, terutama ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan berbeda.

Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, karakter tersebut berhubungan erat dengan konsep warga negara yang baik. Warga negara yang baik bukan hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif, menghormati orang lain, dan menjaga kepentingan bersama. Di ruang digital, karakter warga negara yang baik dapat diwujudkan melalui sikap santun dalam berkomentar, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menjaga privasi, menghargai hak cipta, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Susanto dkk. (2024), menemukan bahwa interaksi digital warga negara muda masih menghadapi persoalan seperti perundungan online, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, penipuan, dan pelecehan seksual online. Oleh karena itu, mereka menawarkan pentingnya integrasi pendidikan kewarganegaraan digital untuk meningkatkan kompetensi digital warga negara muda.

Dengan demikian, karakter mahasiswa di era digital perlu dibentuk melalui pendidikan yang tidak hanya mengajarkan kecakapan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran moral dan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam proses ini karena dapat mengarahkan mahasiswa agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas, etis, kritis, dan bertanggung jawab.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Kritis Mahasiswa

Salah satu karakter penting yang harus dimiliki mahasiswa di era digital adalah sikap kritis. Sikap kritis diperlukan karena informasi di internet tidak selalu benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa sering kali menerima berbagai informasi melalui media sosial, portal berita, grup percakapan, dan platform digital lainnya. Apabila informasi tersebut diterima tanpa proses berpikir kritis, mahasiswa dapat dengan mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, propaganda, atau opini yang menyesatkan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk sikap kritis mahasiswa melalui pembelajaran tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, hukum, Pancasila, dan etika kehidupan berbangsa. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diajak untuk memahami persoalan sosial dan kebangsaan secara rasional. Mahasiswa tidak hanya diminta menghafal konsep, tetapi juga perlu diajak menganalisis kasus, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran seperti ini dapat melatih mahasiswa untuk berpikir logis, terbuka, dan tidak mudah menerima informasi secara mentah.

Sikap kritis dalam konteks digital dapat diwujudkan melalui kemampuan mengecek sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai sumber, memahami konteks informasi, serta tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Putri & Ardoni (2025), dalam penelitian terhadap mahasiswa Universitas Negeri Padang menemukan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan penyebaran hoaks. Mahasiswa dengan literasi digital yang tinggi cenderung lebih mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikaitkan dengan literasi digital. Mahasiswa yang kritis tidak hanya mampu memahami isu-isu kebangsaan, tetapi juga mampu menilai kebenaran informasi yang beredar di ruang digital. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat diarahkan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis melalui pembahasan isu aktual, seperti hoaks politik, ujaran kebencian, pelanggaran hukum di media sosial, dan konflik akibat perbedaan pendapat di ruang digital.

Selain itu, Haliq dkk. (2025), menemukan bahwa mahasiswa umumnya telah memiliki pemahaman dasar tentang literasi digital, seperti mengenali sumber informasi yang kredibel, memahami cara verifikasi informasi, dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Namun, masih terdapat sebagian mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi berita hoaks secara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kritis mahasiswa masih perlu diperkuat secara terus-menerus melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan digital.

Kemampuan berpikir kritis juga berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menyusun pendapat secara bertanggung jawab. Di era digital, banyak orang mudah menyampaikan komentar tanpa mempertimbangkan fakta dan etika. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membimbing mahasiswa agar kebebasan berpendapat tidak digunakan secara sembarangan, melainkan disertai tanggung jawab moral dan hukum. Dengan demikian, sikap kritis bukan berarti bebas menolak segala informasi, tetapi mampu menilai informasi dengan pertimbangan yang rasional, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Tanggung Jawab Mahasiswa

Selain sikap kritis, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter tanggung jawab mahasiswa. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam kehidupan sebagai warga negara, tanggung jawab mencakup kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dan persatuan. Dalam ruang digital, tanggung jawab berarti kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tidak merugikan orang lain.

Mahasiswa sebagai warga negara digital harus memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi. Setiap unggahan, komentar, pesan, dan informasi yang dibagikan dapat berdampak pada diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan perundungan digital, tidak menyebarkan data pribadi orang lain, tidak melakukan plagiarisme, serta tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Tanggung jawab digital ini sejalan dengan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya nilai keadaban, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kepatuhan terhadap aturan.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab mahasiswa di ruang digital juga berkaitan dengan adanya regulasi yang mengatur penggunaan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional subjek data pribadi. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa kebebasan digital tetap memiliki batas hukum dan harus dijalankan secara bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa memahami hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berpartisipasi di ruang digital. Namun, hak tersebut harus disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga etika

komunikasi, dan mematuhi hukum. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana pembentukan kesadaran bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu menggunakan kebebasannya secara bijak.

Saputra (2022), menjelaskan bahwa integrasi kewarganegaraan digital dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi upaya untuk menumbuhkan etika berinternet atau netiket di kalangan mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembang kepribadian perlu merespons perkembangan teknologi dan informasi dengan mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan perangkat pembelajaran, seperti RPS dan SAP, serta pendekatan pembelajaran yang memperhatikan latar belakang keilmuan mahasiswa.

Dengan demikian, tanggung jawab mahasiswa di era digital tidak dapat dibentuk hanya melalui aturan, tetapi perlu dibangun melalui kesadaran nilai. Pendidikan Kewarganegaraan berperan menanamkan kesadaran bahwa setiap mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Digital

Pendidikan Kewarganegaraan di era digital perlu berhubungan erat dengan literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, menilai, menggunakan, dan membagikan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks mahasiswa, literasi digital menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi warga negara digital yang cerdas dan berkarakter.

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi (2023), menjelaskan empat pilar literasi digital, yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Cakap digital berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat serta platform digital. Aman digital berkaitan dengan kemampuan melindungi diri dan informasi pribadi dari risiko digital. Budaya digital berkaitan dengan pemahaman terhadap norma, nilai, dan budaya dalam ruang digital. Sementara itu, etika digital berkaitan dengan perilaku moral, privasi, hak cipta, dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi.

Keempat pilar tersebut sangat relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Cakap digital berkaitan dengan kemampuan mahasiswa menggunakan teknologi untuk belajar dan berpartisipasi secara positif. Aman digital berkaitan dengan kesadaran mahasiswa untuk menjaga keamanan data pribadi dan menghindari kejahatan siber. Budaya digital berkaitan dengan kemampuan mahasiswa membawa nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan gotong royong ke dalam ruang digital. Etika digital berkaitan dengan kemampuan mahasiswa menjaga sopan santun, menghormati hak orang lain, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi ruang untuk mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, pembelajaran tentang demokrasi dapat dikaitkan dengan etika menyampaikan pendapat di media sosial. Pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara dapat dikaitkan dengan hak digital dan tanggung jawab digital. Pembelajaran tentang hukum dapat dikaitkan dengan UU ITE dan perlindungan data pribadi. Pembelajaran tentang Pancasila dapat dikaitkan dengan budaya digital yang santun, toleran, dan menghargai keberagaman.

Khairunisa dkk. (2024) menemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kepribadian warga negara yang mampu beradaptasi

di era digital. Kajian tersebut juga menekankan bahwa konsep kewarganegaraan digital dapat menjadi dasar dalam merancang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dan literasi digital saling melengkapi. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan dasar nilai, sedangkan literasi digital memberikan kemampuan praktis untuk hidup di ruang digital. Jika keduanya diintegrasikan, mahasiswa dapat menjadi warga negara digital yang kritis, beretika, aman, dan bertanggung jawab.

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa, pelaksanaannya di era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah anggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan hanya mata kuliah teori yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Akibatnya, sebagian mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk mendalami materi Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal, nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa, termasuk dalam aktivitas digital.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Widiatmaka dkk., (2025), menyebutkan beberapa problematika Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter mahasiswa di era digital, antara lain keterbatasan jam mengajar karena di perguruan tinggi hanya 2 SKS, kompetensi dosen yang belum maksimal, mahasiswa lebih tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya bangsa, serta rendahnya motivasi belajar mahasiswa karena masih ada dosen yang belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Selain tantangan pembelajaran, terdapat pula tantangan moral digital. Az-zahra dkk. (2025), menjelaskan bahwa krisis etika digital di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, lemahnya kesadaran hukum, dan menurunnya internalisasi nilai Pancasila dalam ruang digital. Tantangan utama yang muncul meliputi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perundungan siber. Kajian tersebut menegaskan bahwa penguatan etika dan literasi digital merupakan agenda penting untuk membangun ekosistem digital yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengalami pembaruan dalam pendekatan pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh hanya disampaikan melalui ceramah dan hafalan, tetapi perlu dikembangkan melalui diskusi kasus, analisis isu aktual, pembelajaran berbasis proyek, debat, refleksi, dan pemanfaatan media digital. Dengan cara ini, mahasiswa dapat melihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar mata kuliah wajib, tetapi bekal untuk menghadapi persoalan nyata dalam kehidupan sosial dan digital.

Rojak (2024), menjelaskan bahwa pengembangan karakter mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan pendekatan pembelajaran yang relevan dan menarik, integrasi teknologi, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta penguatan peran dosen sebagai model dan pembimbing karakter mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga oleh metode pembelajaran dan keteladanan pendidik.

Dengan demikian, tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital harus dijawab melalui pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berbasis nilai. Pendidikan Kewarganegaraan perlu dirancang agar dekat dengan kehidupan mahasiswa, terutama

dengan mengaitkan materi kewarganegaraan dengan isu digital seperti hoaks, etika bermedia sosial, keamanan data, demokrasi digital, dan tanggung jawab warga negara digital.

Strategi Penguatan Karakter Mahasiswa yang Kritis dan Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat karakter mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu dibuat kontekstual dengan kehidupan mahasiswa. Dosen dapat menggunakan contoh kasus yang dekat dengan mahasiswa, seperti penyebaran hoaks di media sosial, konflik akibat perbedaan pendapat, pelanggaran privasi, *cyberbullying*, dan penyalahgunaan teknologi. Melalui analisis kasus, mahasiswa dapat belajar menilai masalah secara kritis sekaligus memahami konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan digital.

Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran. Integrasi ini dapat dilakukan dengan mengajak mahasiswa memverifikasi berita, membandingkan sumber informasi, membuat konten edukatif tentang kewarganegaraan, serta berdiskusi tentang etika digital. Fahmi dkk. (2024), menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di era digital perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui integrasi keterampilan berpikir kritis, literasi digital, verifikasi informasi, dan etika digital dalam kurikulum.

Ketiga, pembelajaran perlu mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan diskusi, debat, proyek sosial, kampanye digital positif, atau penulisan opini tentang isu kewarganegaraan. Kegiatan seperti ini dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara santun, dan bertanggung jawab terhadap gagasan yang disampaikan. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi ruang latihan demokrasi bagi mahasiswa.

Keempat, dosen perlu menjadi teladan dalam membangun karakter mahasiswa. Pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui teori, tetapi perlu ditunjukkan melalui sikap. Dosen yang terbuka terhadap dialog, menghargai pendapat mahasiswa, menggunakan teknologi secara bijak, dan memberi contoh etika akademik dapat menjadi model bagi mahasiswa. Keteladanan ini penting karena pembentukan karakter tidak hanya terjadi melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui pengalaman belajar yang dialami mahasiswa.

Kelima, perguruan tinggi perlu mendukung penguatan karakter mahasiswa melalui budaya akademik yang sehat. Kampus dapat mendorong literasi digital, anti plagiarisme, diskusi ilmiah, etika bermedia sosial, dan kegiatan kemahasiswaan yang menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dengan dukungan lingkungan kampus, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu mata kuliah, tetapi menjadi bagian dari budaya pendidikan tinggi.

Dengan strategi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat lebih efektif dalam membentuk mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang kritis mampu menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menyampaikan pendapat berdasarkan fakta. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab mampu menggunakan teknologi secara etis, menghormati orang lain, dan menyadari dampak dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa di era

digital. Peran tersebut terlihat dalam tiga aspek utama. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan memberikan dasar nilai bagi mahasiswa melalui penguatan Pancasila, demokrasi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab sosial. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan membentuk sikap kritis mahasiswa dalam menghadapi arus informasi digital, terutama agar mahasiswa mampu menyaring informasi, menghindari hoaks, dan tidak mudah terpengaruh provokasi. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan membentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara digital, yaitu menggunakan teknologi secara bijak, etis, aman, dan sesuai dengan hukum.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pembentukan karakter mahasiswa di era digital tidak cukup hanya dilakukan melalui penguasaan teknologi. Mahasiswa juga membutuhkan pendidikan nilai agar mampu menggunakan teknologi dengan kesadaran moral dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menghubungkan nilai-nilai kebangsaan dengan realitas digital yang dihadapi mahasiswa sehari-hari.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi dasar penting dalam membentuk mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab di era digital. Mahasiswa yang memiliki karakter tersebut diharapkan mampu menjadi warga negara yang cerdas, beretika, demokratis, sadar hukum, dan mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai dasar pembentukan karakter mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab di era digital. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai negara, Pancasila, hukum, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, kesadaran kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, mahasiswa dituntut mampu berpikir kritis dalam menerima, menyaring, dan membagikan informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, ujaran kebencian, maupun provokasi di media digital. Selain itu, mahasiswa juga perlu memiliki tanggung jawab sebagai warga negara digital dengan menggunakan teknologi secara bijak, santun, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan secara kontekstual dan adaptif agar mampu membentuk mahasiswa yang cerdas, beretika, demokratis, sadar hukum, serta mampu berpartisipasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, Februari 7). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. *apjii.or.id*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Az-zahra, F., Lumbanbatu, R. B., Siburian, T. D. N., & Anggraini, T. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 327–338. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2>
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 218–234. <https://doi.org/10.1080/10511253.2012.730617>
- Fahmi, M. A., Mujidan, M., Saputro, W. A., & Amir, D. R. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan

- di era digital. *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 6(1). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/Prosiding/article/view/2895>
- Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. (2023). 4 Pilar Literasi Digital – CABE (Cakap Aman Budaya Etika). *gnld.siberkreasi.id*. <https://gnld.siberkreasi.id/modul/>
- Haliq, A., Hafid, A., Asriadi, & Nojeng, A. (2025). Tingkat Literasi Digital : Kemampuan Mahasiswa dalam Menganalisis Berita Hoaks. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, 11(2), 1852–1868. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5277>
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2024). *Sage Research Methods The Literature Review : Six Steps to Success*. Corwin Press. <https://doi.org/10.4135/9781071939031>
- Putri, Y. K., & Ardoni. (2025). Pengaruh Penerapan Literasi Digital terhadap Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 27752–27759. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31337>
- Rojak, J. A. (2024). Upaya Pengembangan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–56. <https://jurnalnala.id/index.php/nala/article/view/52>
- Saputra, M. (2022). Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) di Kalangan Mahasiswa 2022. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 6–15. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v12i01.13635>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susanto, E., Budimansyah, D., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2024). No Title. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 309–320. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10337>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. JDIH BPK RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (Nomor 016999).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2024). *Undang.Undang Republik Indonesi.A Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Unesco. (2022, Februari 12). Media and Information Literacy. *unesco.org*. <https://www.unesco.org/en/media-information-literacy>
- Widiatmaka, P., Nuryadi, M. H., & Sugiyanto, A. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembelajaran dalam menumbuhkan karakter bangsa pada mahasiswa di era digital. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 25(1), 99–108. <https://doi.org/10.21831/hum.v25i1.80367>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.